

Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kampung Tirtalaya Berbasis Model IPO-O

Raditya Nugraha¹⁾, Annisa Nurmalia Sari²⁾, Azka Azizah Efendi³⁾, Hafshania Noor Ariefah⁴⁾, Riswanda⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

email: nraditya10@gmail.com¹⁾, annisanurmala1205@gmail.com²⁾, azkazizah06@gmail.com³⁾,
hafshaniaana@gmail.com⁴⁾, riswanda@untirta.ac.id⁵⁾

(Diterima Juli 2026); Disetujui Agustus 2026); Dipublikasikan September 2026)

Abstrak

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh melalui pembangunan infrastruktur dasar, penguatan kelembagaan lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kampung Tirtalaya RW 24, Kelurahan Serang, menggunakan model IPO-O yang mencakup dimensi input, process, output, dan outcome. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi input, program telah didukung regulasi, kelembagaan, dan keterlibatan berbagai aktor, tetapi masih menghadapi keterbatasan anggaran dan kapasitas pemeliharaan pascapembangunan. Pada dimensi process, sosialisasi, koordinasi, komunikasi, dan monitoring telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai prioritas bantuan dan tanggung jawab pemeliharaan. Pada dimensi output, program menghasilkan pembangunan drainase, jalan lingkungan, dan fasilitas sanitasi, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya merata. Pada dimensi outcome, program berdampak positif terhadap kualitas lingkungan dan pengurangan potensi genangan, namun keberlanjutan manfaat masih lemah karena pemeliharaan infrastruktur belum konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Program KOTAKU secara nasional telah berakhir, upaya penanganan kawasan kumuh sejenis tetap perlu dilanjutkan melalui penguatan koordinasi, monitoring pascapembangunan, dan pemeliharaan berbasis komunitas.

Kata kunci: Program KOTAKU; evaluasi kebijakan; IPO-O; permukiman kumuh; Kelurahan Serang.

Abstract

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) is a government policy to improve the quality of slum settlements through basic infrastructure development, strengthening local institutions, and community empowerment. This study aims to evaluate the implementation of Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) in Kampung Tirtalaya RW 24, Kelurahan Serang, using the IPO-O model, which includes the dimensions of input, process, output, and outcome. This study uses a descriptive qualitative approach through interviews, field observations, documentation, and document studies. The results show that in the input dimension, the program was supported by regulations, institutions, and the involvement of various actors, but still faced limitations in budget and post-construction maintenance capacity. In the process dimension, socialization, coordination, communication, and monitoring had been carried out, but were not fully effective in building community understanding of aid priority mechanisms and maintenance responsibilities. In the output dimension, the program produced drainage construction, neighborhood roads, and sanitation facilities, but the benefits were not fully distributed evenly. In the outcome dimension, the program had a positive impact on environmental quality and the reduction of potential flooding, but the sustainability of its benefits remained weak because infrastructure maintenance was not yet consistent. This study concludes that although Program KOTAKU has ended nationally, similar slum settlement improvement efforts still need to be continued through strengthening coordination, post-construction monitoring, and community-based maintenance.

Keywords: KOTAKU Program; policy evaluation; IPO-O; slums; Serang Subdistrict.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi merupakan tantangan penting dalam pembangunan perkotaan karena meningkatkan kebutuhan terhadap hunian layak dan infrastruktur dasar. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan tidak hanya berdampak pada kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga pada penyediaan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, air minum, dan pengelolaan sampah. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara memadai, kawasan permukiman berpotensi mengalami penurunan kualitas lingkungan dan berkembang menjadi kawasan kumuh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah Databoks (2021), jumlah penduduk perkotaan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari 118,3 juta jiwa pada tahun 2010 menjadi proyeksi 203,1 juta jiwa pada tahun 2035. Persentase penduduk perkotaan juga meningkat dari 49,8% menjadi 66,6% pada periode yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap permukiman layak dan infrastruktur dasar di wilayah perkotaan akan semakin meningkat.

Gambar 1.1 Perbandingan Jumlah Penduduk Perkotaan dan Total Penduduk Indonesia Tahun 2010–2035



Sumber: Databoks, 2021

Gambar 1.1 menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk perkotaan yang berlangsung secara konsisten. Peningkatan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong perlunya penanganan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan, terutama pada wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Sebagai upaya penanganan kawasan kumuh, pemerintah melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penguatan kelembagaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan hasil pembangunan.

Di Kampung Tirtalaya RW 24, Kelurahan Serang, Program KOTAKU telah menghasilkan pembangunan infrastruktur seperti drainase dan jalan lingkungan. Namun, hasil observasi menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait kebersihan drainase, pengelolaan sampah, serta pemeliharaan infrastruktur pascapembangunan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya infrastruktur fisik, tetapi juga oleh keberlanjutan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Penelitian mengenai Program KOTAKU umumnya lebih banyak menyoroti capaian pembangunan fisik. Sementara itu, kajian yang menghubungkan aspek sumber daya, proses pelaksanaan, hasil pembangunan, dan keberlanjutan manfaat program pada tingkat lokal masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kampung Tirtalaya RW 24, Kelurahan Serang menggunakan model IPO-O (*Input, Process, Output, Outcome*). Evaluasi ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara sumber daya, proses implementasi, hasil program, dan keberlanjutan manfaat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus evaluatif untuk memahami pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kampung Tirtalaya RW 24, Kelurahan Serang. Fokus penelitian meliputi regulasi, kelembagaan, pembangunan infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan pemeliharaan pascapembangunan. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan pelaksanaan program secara mendalam.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi dokumen. Informan utama terdiri atas Ketua RT Kampung Tirtalaya RW 24 dan pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kota Serang. Peneliti juga memperoleh informasi pendukung dari warga sekitar serta melakukan penelusuran kelembagaan ke Dinas PUPR Kota Serang. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan dan infrastruktur hasil Program KOTAKU. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat temuan penelitian, sedangkan studi dokumen dilakukan terhadap regulasi, laporan instansi, dan data kawasan kumuh. Teknik analisis data menggunakan model IPO-O (*Input, Process, Output, Outcome*) dengan validitas data melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kampung Tirtalaya RW 24 Kelurahan Serang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor. Di lokasi penelitian, program ini diwujudkan melalui pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong serta perbaikan jalan lingkungan. Hasil observasi menunjukkan bahwa infrastruktur fisik telah tersedia, namun masih ditemukan persoalan pada aspek pemeliharaan, kebersihan saluran, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan.

Berdasarkan aspek input, Program KOTAKU telah didukung oleh regulasi, aktor pelaksana, dan sumber pembiayaan. Pelaksanaan program melibatkan pemerintah daerah, Dinas PERKIM, DPUPR, BAPPEDA, BKM, kelurahan, RT/RW, serta masyarakat. Meskipun demikian, input program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan anggaran, perlunya penguatan kapasitas pelaksana, serta belum jelasnya sistem pemeliharaan pascapembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan awal program sudah tersedia, tetapi masih perlu diperkuat agar pelaksanaan dan keberlanjutan program dapat berjalan lebih baik.

Pada aspek proses, pelaksanaan Program KOTAKU dilakukan melalui sosialisasi, koordinasi antaraktor, pembangunan fisik, dan monitoring. Sosialisasi telah dilakukan melalui pertemuan warga dan forum yang melibatkan kelurahan serta BKM, tetapi pemahaman masyarakat terhadap mekanisme prioritas bantuan belum sepenuhnya merata. Koordinasi antarinstansi sudah berjalan, namun masih perlu diperkuat terutama pada tahap pascapembangunan, seperti pembagian tanggung jawab pemeliharaan drainase, pelaporan kerusakan, dan tindak lanjut pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa proses implementasi telah berjalan, tetapi komunikasi program dan monitoring berkelanjutan masih menjadi titik lemah.

Program KOTAKU juga telah menghasilkan output fisik berupa saluran drainase atau gorong-gorong, jalan lingkungan, dan bukti peresmian program di Kampung Tirtalaya. Keberadaan infrastruktur tersebut menunjukkan bahwa program telah direalisasikan secara nyata dan memberi kontribusi terhadap perbaikan kondisi fisik lingkungan. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa saluran masih mengalami endapan, sampah, dan tumbuhan liar.

Oleh karena itu, output program tidak hanya perlu dinilai dari keberadaan bangunan fisik, tetapi juga dari fungsi, kualitas, pemanfaatan, dan pemeliharannya dalam jangka panjang.

Gambar 4.1 Kondisi Saluran Drainase di Kampung Tirtalaya



Sumber: Peneliti, 2026

Gambar 4.2 Batu Peresmian Program KOTAKU di Kampung Tirtalaya



Sumber: Peneliti, 2026

Gambar 4.3 Kondisi Jalan Lingkungan dan Saluran Drainase di Kampung Tirtalaya



Sumber: Peneliti, 2026

Dari aspek outcome, Program KOTAKU menunjukkan indikasi dampak positif terhadap kualitas lingkungan permukiman di Kampung Tirtalaya. Pembangunan drainase dan jalan lingkungan berpotensi mengurangi genangan, memperbaiki aksesibilitas, serta membuat lingkungan lebih tertata dan nyaman. Akan tetapi, dampak tersebut belum sepenuhnya berkelanjutan karena masih ditemukan persoalan pemeliharaan dan belum meratanya partisipasi

Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kampung Tirtalaya Berbasis Model IPO-O

masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran. Dengan demikian, keberhasilan Program KOTAKU tidak cukup dilihat dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari keberlanjutan manfaat yang dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Pembahasan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa persoalan utama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kampung Tirtalaya RW 24 tidak hanya terletak pada pembangunan fisik, tetapi pada keberlanjutan pengelolaan hasil program. Dalam kerangka IPO-O, dimensi *input*, *process*, *output*, dan *outcome* saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan program. Kelemahan pada tahap awal, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi, dan kesiapan pemeliharaan, dapat memengaruhi proses pelaksanaan dan keberlanjutan manfaat program. Oleh karena itu, pembahasan ini diarahkan untuk melihat hubungan antar dimensi, bukan hanya mengulang capaian program.

Pada dimensi *input*, Program KOTAKU telah memiliki dasar regulasi, kelembagaan, dan keterlibatan aktor yang cukup memadai. Keterlibatan Dinas PERKIM, DPUPR, BAPPEDA, BKM, pemerintah kelurahan, RT/RW, dan masyarakat menunjukkan bahwa program ini dirancang melalui pendekatan kolaboratif. Namun, keterlibatan banyak aktor belum otomatis menjamin efektivitas pelaksanaan apabila pembagian peran, koordinasi, dan tanggung jawab pemeliharaan belum berjalan jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa *input* program tidak hanya perlu dilihat dari ketersediaan sumber daya, tetapi juga dari kesiapan aktor dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Keterbatasan pada dimensi *input* kemudian memengaruhi dimensi *process*. Sosialisasi, koordinasi, komunikasi, dan *monitoring* memang telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya mampu membangun pemahaman masyarakat mengenai mekanisme prioritas bantuan dan tanggung jawab pemeliharaan. Sebagian masyarakat masih memahami program sebagai bantuan fisik, padahal pelaksanaan KOTAKU ditentukan oleh indikator kekumuhan, kebutuhan prioritas, dan ketersediaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa proses implementasi belum sepenuhnya berhasil menjembatani tujuan program dengan pemahaman masyarakat sebagai penerima manfaat.

Kelemahan pada dimensi *process* berdampak pada dimensi *output*. Program KOTAKU telah menghasilkan pembangunan drainase, jalan lingkungan, dan infrastruktur dasar lain di Kampung Tirtalaya. Namun, keberadaan *output* fisik tersebut belum cukup untuk menunjukkan keberhasilan program secara menyeluruh. Drainase dan jalan lingkungan perlu dinilai bukan hanya dari keberadaannya, tetapi juga dari fungsi, kualitas, pemerataan manfaat, dan pemeliharannya setelah pembangunan selesai.

Temuan adanya endapan, sampah, dan tumbuhan liar pada beberapa titik saluran drainase menunjukkan bahwa *output* fisik belum sepenuhnya didukung oleh sistem pemeliharaan yang kuat. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan manfaatnya. Jika pemeliharaan tidak dilakukan secara konsisten, infrastruktur yang telah dibangun berpotensi mengalami penurunan kualitas. Dengan demikian, keberhasilan program tidak cukup diukur dari selesainya pembangunan, tetapi juga dari kemampuan program menjaga fungsi infrastruktur dalam jangka panjang.

Pada dimensi *outcome*, Program KOTAKU menunjukkan indikasi dampak positif terhadap kualitas lingkungan, kenyamanan warga, dan pengurangan potensi genangan. Akan tetapi, dampak tersebut belum dapat dikatakan sepenuhnya berkelanjutan karena partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan masih belum konsisten. Perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan mulai terlihat, tetapi masih perlu diperkuat melalui sosialisasi, pengawasan, dan

pembiasaan pemeliharaan berbasis komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa *outcome* program sangat bergantung pada keberlanjutan proses setelah pembangunan fisik selesai.

Hubungan antar dimensi IPO-O menunjukkan bahwa persoalan keberlanjutan Program KOTAKU tidak dapat dipahami secara terpisah. Keterbatasan *input* memengaruhi kualitas *process*, proses yang belum optimal memengaruhi keberlanjutan *output*, dan *output* yang tidak dipelihara secara konsisten akan membatasi *outcome*. Dalam konteks Kampung Tirtalaya, pembangunan drainase dan jalan lingkungan telah memberikan manfaat nyata, tetapi manfaat tersebut masih rentan menurun apabila tidak didukung oleh sistem pemeliharaan yang jelas. Oleh sebab itu, titik penting evaluasi program terletak pada penguatan hubungan antara pembangunan fisik dan tata kelola pemeliharaan pascapembangunan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa Program KOTAKU di Kampung Tirtalaya telah memberikan kontribusi terhadap perbaikan lingkungan permukiman. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan manfaat karena masih terdapat kelemahan pada koordinasi, *monitoring*, dan partisipasi masyarakat. Program penanganan kawasan kumuh perlu diarahkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pelembagaan sistem pemeliharaan berbasis komunitas. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat bertahan lebih lama dan benar-benar dirasakan sebagai *outcome* kebijakan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan model IPO-O, pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kampung Tirtalaya RW 24 menunjukkan bahwa program telah memberikan manfaat terhadap perbaikan lingkungan permukiman. Manfaat tersebut terlihat melalui pembangunan drainase, jalan lingkungan, dan peningkatan kualitas akses masyarakat. Namun, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa keberhasilan program belum sepenuhnya berkelanjutan karena masih terdapat persoalan pada pemeliharaan infrastruktur, koordinasi antaraktor, dan partisipasi masyarakat.

Pada dimensi *input*, program telah didukung oleh regulasi, kelembagaan, dan keterlibatan berbagai aktor pelaksana. Akan tetapi, keterbatasan anggaran dan belum jelasnya sistem pemeliharaan pascapembangunan menjadi hambatan penting dalam menjaga keberlanjutan hasil program. Oleh karena itu, perbaikan pada dimensi *input* perlu diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan lokal, kejelasan pembagian peran, dan dukungan sumber daya untuk pemeliharaan infrastruktur.

Pada dimensi *process*, sosialisasi, koordinasi, komunikasi, dan *monitoring* telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif. Sebagian masyarakat belum memahami bahwa bantuan program ditentukan berdasarkan indikator kekumuhan, kebutuhan prioritas, dan ketersediaan anggaran. Kondisi ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih jelas dan berkelanjutan agar masyarakat memahami mekanisme program serta tanggung jawab dalam menjaga hasil pembangunan.

Pada dimensi *output*, Program KOTAKU telah menghasilkan pembangunan fisik berupa drainase, jalan lingkungan, dan fasilitas pendukung lainnya. Namun, hasil tersebut belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan manfaat apabila tidak disertai pemeliharaan yang konsisten. Temuan adanya endapan, sampah, dan tumbuhan liar pada beberapa saluran drainase menunjukkan bahwa *output* fisik masih perlu diperkuat dengan sistem pengawasan dan pemeliharaan berbasis komunitas.

Pada dimensi *outcome*, program menunjukkan indikasi dampak positif terhadap kualitas lingkungan, kenyamanan warga, dan pengurangan potensi genangan. Akan tetapi, dampak tersebut masih rentan menurun apabila partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur belum berjalan secara konsisten. Dengan demikian, umpan balik evaluatif utama dari penelitian ini adalah

Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kampung Tirtalaya Berbasis Model IPO-O

perlunya memperkuat hubungan antara pembangunan fisik, pengawasan pascapembangunan, dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan manfaat program.

Program KOTAKU di Kampung Tirtalaya telah memberikan kontribusi terhadap perbaikan kualitas lingkungan permukiman. Namun, Program KOTAKU secara nasional telah berakhir pada tahun 2022, sehingga keputusan evaluatif dalam penelitian ini tidak diarahkan pada kelanjutan KOTAKU sebagai nama program administratif. Keputusan yang lebih tepat adalah melanjutkan upaya penanganan kawasan kumuh melalui program atau kebijakan daerah yang memiliki tujuan serupa. Dengan demikian, fokus kebijakan tidak lagi pada keberlanjutan nama Program KOTAKU, tetapi pada keberlanjutan fungsi dan manfaat penanganan kawasan kumuh.

Berdasarkan hasil evaluasi, terminasi penuh terhadap upaya penanganan kawasan kumuh tidak disarankan karena persoalan permukiman kumuh di Kampung Tirtalaya masih memerlukan perhatian. Jika seluruh bentuk intervensi dihentikan tanpa program pengganti, infrastruktur yang telah dibangun berpotensi mengalami penurunan kualitas. Drainase, jalan lingkungan, dan fasilitas sanitasi tetap membutuhkan pemeliharaan, pengawasan, dan dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, berakhirnya Program KOTAKU secara administratif perlu diikuti dengan pelembagaan hasil program ke dalam kebijakan daerah yang berkelanjutan.

Keputusan yang lebih sesuai adalah kelanjutan substansi kebijakan melalui program daerah atau kegiatan pemeliharaan berbasis masyarakat. Artinya, Program KOTAKU sebagai program nasional dapat dianggap selesai, tetapi tujuan penanganan permukiman kumuh tetap perlu dilanjutkan melalui mekanisme lain. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa infrastruktur yang sudah dibangun tidak menjadi aset yang dibiarkan tanpa pengelolaan. Upaya ini penting agar hasil pembangunan tetap memberi manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan demikian, keputusan evaluatif penelitian ini adalah tidak melanjutkan Program KOTAKU sebagai program administratif, tetapi melanjutkan upaya penanganan kawasan kumuh sejenis melalui kebijakan yang lebih berkelanjutan. Kebijakan tersebut perlu menekankan koordinasi lintas sektor, pemeliharaan infrastruktur, *monitoring* pascapembangunan, dan partisipasi masyarakat. Keputusan ini sejalan dengan temuan bahwa persoalan utama bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi pada keberlanjutan pengelolaan hasil program. Melalui pendekatan tersebut, manfaat Program KOTAKU dapat tetap dipertahankan meskipun program nasionalnya telah berakhir.

Penguatan koordinasi lintas sektor perlu dilakukan melalui mekanisme kerja yang lebih terstruktur antara Dinas PERKIM, DPUPR, BAPPEDA, pemerintah kelurahan, BKM, RT/RW, dan masyarakat. Koordinasi tersebut tidak hanya diperlukan pada tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap pemeliharaan pascapembangunan. Pemerintah daerah perlu memperjelas pihak yang bertanggung jawab terhadap pemantauan drainase, pembersihan saluran, pelaporan kerusakan, dan tindak lanjut perbaikan.

Sosialisasi kepada masyarakat perlu diarahkan pada pemahaman mengenai mekanisme prioritas bantuan dan tanggung jawab pemeliharaan infrastruktur. Masyarakat perlu memahami bahwa program penanganan kawasan kumuh tidak selalu memberikan bentuk bantuan yang sama pada setiap wilayah. Penentuan intervensi bergantung pada indikator kekumuhan, kebutuhan prioritas, dan ketersediaan anggaran. Sosialisasi juga perlu menekankan bahwa drainase, jalan lingkungan, dan fasilitas sanitasi hanya dapat memberi manfaat jangka panjang apabila dipelihara bersama.

Monitoring pascapembangunan perlu dibuat lebih substantif dan berkelanjutan. Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui laporan administratif, tetapi juga harus melihat kondisi fisik infrastruktur secara berkala. Aspek yang perlu dipantau meliputi kebersihan drainase, fungsi

saluran air, kondisi jalan lingkungan, titik genangan, dan keterlibatan warga dalam pemeliharaan. Hasil *monitoring* tersebut dapat menjadi dasar penyusunan rencana pemeliharaan pada tingkat kelurahan.

Keberlanjutan program perlu dibangun melalui sistem pemeliharaan berbasis komunitas. BKM, RT/RW, dan warga dapat dilibatkan dalam jadwal kerja bakti, pelaporan kerusakan, dan pengawasan kebersihan saluran. Pemerintah daerah tetap perlu memberikan dukungan teknis dan anggaran pemeliharaan sesuai kebutuhan. Namun, keberlanjutan manfaat tidak akan tercapai tanpa perubahan perilaku warga dalam menjaga lingkungan permukiman.

PENUTUP

Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kampung Tirtalaya RW 24, Kelurahan Serang, berdasarkan model IPO-O menunjukkan bahwa program telah memberikan kontribusi terhadap perbaikan kualitas lingkungan permukiman. Pada dimensi *input*, program telah didukung oleh regulasi, kelembagaan, dan keterlibatan berbagai aktor pelaksana, tetapi masih menghadapi keterbatasan anggaran, kapasitas pelaksana, dan kesiapan sistem pemeliharaan pascapembangunan. Pada dimensi *process*, sosialisasi, koordinasi, komunikasi, dan *monitoring* telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya membangun pemahaman masyarakat mengenai prioritas bantuan dan tanggung jawab pemeliharaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kesiapan sumber daya dan proses pelaksanaan yang berkelanjutan.

Pada dimensi *output*, Program KOTAKU menghasilkan pembangunan drainase, jalan lingkungan, fasilitas sanitasi, serta penurunan luas kawasan kumuh pada tingkat Kota Serang. Namun, capaian lokal di Kampung Tirtalaya masih perlu diperkuat dengan data yang lebih spesifik, seperti panjang drainase yang dibangun, jumlah ruas jalan yang diperbaiki, jumlah penerima manfaat, atau titik genangan yang berkurang. Pada dimensi *outcome*, program memberikan dampak positif terhadap kenyamanan lingkungan dan pengurangan potensi genangan, tetapi manfaat jangka panjang masih terancam oleh lemahnya pemeliharaan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, hasil evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan antara *output* fisik yang telah dibangun dan *outcome* berkelanjutan yang masih perlu diperkuat.

Meskipun Program KOTAKU secara nasional telah berakhir pada tahun 2022, kebutuhan penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Serang masih tetap relevan. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini bukan melanjutkan KOTAKU sebagai program administratif, melainkan melanjutkan upaya penanganan kawasan kumuh melalui program daerah yang lebih berkelanjutan, berbasis data, dan melibatkan komunitas. Penguatan koordinasi lintas sektor, pemeliharaan infrastruktur, *monitoring* pascapembangunan, dan partisipasi warga menjadi kunci agar hasil pembangunan tidak hanya terlihat sebagai *output* fisik. Upaya tersebut juga diperlukan agar hasil program benar-benar menjadi *outcome* lingkungan yang bertahan dalam jangka panjang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena jumlah informan utama masih terbatas dan data lokal Kampung Tirtalaya belum sepenuhnya tersedia secara rinci. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data primer yang lebih komprehensif melalui wawancara mendalam dengan lebih banyak warga, BKM, pemerintah kelurahan, dan perangkat teknis terkait. Selain itu, penelitian berikutnya juga perlu memperluas wilayah kajian agar hasil evaluasi dapat memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai penanganan kawasan permukiman kumuh. Dengan data yang lebih lengkap, evaluasi terhadap keberlanjutan program sejenis dapat dilakukan secara lebih mendalam dan akurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kota Serang yang telah memberikan informasi dan dukungan dalam proses pengumpulan data penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak RT Kampung Tirtalaya RW 24, Kelurahan Serang, serta warga setempat yang telah membantu memberikan keterangan mengenai kondisi lingkungan dan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Serang atas arahan yang diberikan selama proses penelusuran informasi kelembagaan. Penulis berharap dukungan dari berbagai pihak tersebut dapat memperkuat penyusunan artikel ini sebagai bahan evaluasi terhadap keberlanjutan penanganan kawasan permukiman kumuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Riswanda. (2023). Menerapkan literasi kebijakan publik. Madza Media.
- Riswanda. (2024a). Nalar kebijakan: Bernalar kritis dalam sebuah dialektika kebijakan. CV Sintesia.
- Riswanda. (2024b). Menafsirkan paradigma penelitian kebijakan publik. CV Sintesia.
- Riswanda, & Risnawati. (2026). Bukan sekadar bagan: Struktur organisasi dan dinamika kinerja. Sintesia.
- Riswanda. (2026). Skenario kebijakan resilien terhadap ancaman narkoba. Sintesia.
- Jayani, D. H. (2019, September 11). Berapa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia? Databoks.<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/19c1fd30246373d/berapa-jumlah-penduduk-perkotaan-di-indonesia>
- Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. (n.d.). Pemberdayaan. SIPKP Cipta Karya. <https://epkp.ciptakarya.pu.go.id/pemberdayaan>.